



Percepat Mencari Solusi Masalah

Pembangunan PLBN Sungai Kelik

SINTANG-- Wakil Bupati Sintang, Melkianus menjelaskan hambatan dalam proses pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

"PLBN Sungai Kelik memang dalam hal lokasi titik nol belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ini yang harus kita dorong terus agar terjadi kesepakatan soal titik nol ini.

Selama belum ada kesepakatan soal titik nol antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka PLBN

tidak bisa untuk dimulai pembangunannya," terang Melkianus.

Ia mengatakan, soal penetapan tata ruang lokasi pembangunan PLBN Sungai Kelik ini juga belum selesai. Selain itu juga, tanah lokasi pembangunan PLBN ini belum ada ganti rugi kepada masyarakat. Semua masalah tersebut sudah diketahui oleh Kementerian PUPR dan Ketua Komisi V DPR RI. Dan semua sepakat untuk mendukung, mendorong dan mempercepat mencari solusi dari masalah yang menghambat pembangunan PLBN Sungai Kelik.

"Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang, akan kita urus secepatnya. Begitu juga yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, semua sama-sama berproses. Kita akan berkomunikasi dengan semua level pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik ini. Tidak lama lagi akan ada pertemuan Sosek Malindo, kita akan hadir dan menyampaikan hambatan ini," ujarnya.

"Tata ruang lokasi pembangunan PLBN memang belum selesai. Prinsipnya, apa saja yang menjadi kewenangan kita, akan saya dorong dan bantu. Ganti rugi ini memang, bukan ganti rugi tanahnya, melainkan ganti rugi tanam tumbuh. Soal ini, tentu kita yang akan bantu memberikan datanya kepada pemerintah pusat untuk dihitung" tutup Melkianus. (var)



MELKIANUS